



STRATEGI NEGARA-NEGARA BALTIK DALAM MENYIKAPI KEAMANAN KAWASAN TERHADAP RUSIA PASCA KONFLIK KRIMEA

Abednego Mardiatmadja, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Crimean conflict is one of the conflicts that changed the geopolitical and geostrategic dynamics of the Eastern European region. The presence of this conflict certainly increases the potential threat to the security and stability of the three Baltic countries as NATO members, which are directly bordered geographically by Russia. With limited military capacities and capabilities, the three Baltic countries are trying to defend their regional sovereignty from Russia's aggressiveness. This study seeks to answer questions about the Baltic states responses to regional security against Russia following the Crimean conflict. This study uses the regional security complex theory from Barry Buzan and Ole Waever. This research method was prepared using qualitative research methods. The results of this study explain that in defending their region, the Baltic states use a regional approach strategy in an effort to gain collective security from their strategic partners, especially NATO. Diplomatic efforts through the OSCE can also be pursued as an option to maintain regional stability and security.

Keywords: *Crimean Conflict, Regional Security Complex, Regional Approach*

PENDAHULUAN

Krisis Semenanjung Krimea pada mulanya dipicu oleh konflik yang terjadi di Ukraina pada November 2013 akibat dari keputusan Viktor Yanukovych yang menolak penandatanganan pakta kerjasama *Ukraine Association Agreement* yang akan dijadwalkan pada pertemuan Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lithuania. (VOA Indonesia, 2013) Langkah tersebut membuat rakyat yang pro terhadap KTT Kemitraan Uni Eropa menentang keputusan Viktor Yanukovych karena telah menggagalkan upaya kerjasama yang sebelumnya sudah diinisiasi oleh Viktor Yushchenko dalam bentuk *Deep Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)* atau Perjanjian Asosiasi dan Zona Perdagangan Bebas Mendalam-Komprehensif. Setelah menolak kesepakatan tersebut, Viktor Yanukovych lebih memilih untuk menandatangani 14 naskah kerjasama *Joint Action Plan* dengan Rusia dalam persidangan ke-6 Komite Kerjasama Antar-Pemerintah Rusia-Ukraina pada 17 Desember 2013 di Moskwa, Rusia. (VOV, 2013) Keputusan Yanukovych yang lebih pro terhadap Rusia dibanding Uni Eropa serta adanya tindakan dan kebijakan represif kepada penentang Yanukovych menimbulkan gelombang aksi protes yang lebih besar bahkan sejak Ukraina merdeka pada 1991, (Solonenko, 2015) tidak hanya dari luar pemerintahan namun juga dari dalam pemerintahan yang menyebabkan dinamika politik dan pemerintahan Ukraina menjadi semakin tidak stabil.

Pada 22 Februari 2014, Viktor Yanukovich pada akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden oleh parlemen Ukraina dan dinyatakan sebagai buronan pemerintah Ukraina pada 24 Februari 2014.

Serangkaian konflik yang terjadi di ibukota Ukraina menciptakan gelombang perpecahan baru di wilayah Ukraina Timur dan Ukraina Selatan yang mayoritas penduduknya merupakan penutur Rusia dan pendukung Viktor Yanukovich. Perpecahan tersebut kemudian semakin berkembang ke berbagai kota ditandai dengan munculnya konflik terbuka antara demonstran pro pemerintahan baru Ukraina dengan demonstran pro Rusia. (Ramicone, 2014) Pada 27 Februari 2014, demonstran pro Rusia berhasil menguasai gedung parlemen Krimea dan mengibarkan bendera Rusia, mereka meminta kepada pemerintah Republik Otonom Krimea agar segera membuat referendum untuk menjadi bagian dari Federasi Rusia. Setelah insiden tersebut, kemudian terjadi serangkaian pengambil alihan instansi pemerintahan dan sarana umum oleh kelompok pemberontak bersenjata tidak dikenal yang diantaranya diakui Rusia sebagai personil militer mereka yang tidak berencana. Langkah yang diambil oleh Rusia dengan melakukan dukungan secara terbuka kepada milisi pro Rusia di wilayah Krimea diklaim Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan politik dan keamanan kepada penutur Rusia yang berada di Krimea. Pada 16 Maret 2014, melalui referendum reunifikasi yang diikuti oleh 1.274.096 pemilih, menunjukkan bahwa 96,77 persen penduduk Krimea memutuskan untuk menjadi bagian dari Federasi Rusia. (News, Russian Today, 2014) Pada 21 Maret 2014 dengan meninjau dan mempertimbangkan pengajuan surat permohonan reunifikasi oleh pemerintah Republik Otonom Krimea, Konstitusi Federal Hukum Pemerintah Rusia secara resmi memutuskan untuk menjadikan status kedaulatan wilayah Krimea sebagai bagian dari Federasi Rusia. (Georgievsk, 2015)

Peristiwa tersebut kemudian direspon dunia internasional sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap konflik internal di Ukraina. Tindakan ekstrim yang dilakukan oleh Rusia di Semenanjung Krimea juga meningkatkan kewaspadaan negara-negara Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia yaitu Estonia, Latvia dan Lithuania akan semakin berkembangnya potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan negaranya. Lebih lanjut, Jakniunaite mengutip pernyataan Ulman mengenai definisi ancaman bagi keamanan suatu negara sebagai tindakan atau serangkaian peristiwa yang terjadi secara drastis dan dalam waktu yang singkat dapat mengancam atau menurunkan kualitas hidup penduduk suatu negara serta mempersempit pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah dan non-pemerintah didalam negara. (Ulman, 1983) Jika dikorelasikan dengan pernyataan tersebut, aktivitas Rusia di Semenanjung Krimea dapat diidentifikasi sebagai suatu bentuk ancaman yang tidak hanya berfokus pada kekuatan militer tapi juga cara-cara non-militer dan paramiliter, Rusia dianggap sedang menggunakan strategi perang hibrida atau perang campuran dalam memproyeksikan kepentingannya untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Baltik, khususnya di negara-negara bekas Soviet. Pengimplementasian perang hibrida oleh Rusia terlihat jelas jika kita melihat bagaimana peran Rusia di konflik Ukraina dan berbagai macam intervensi Rusia di negara-negara Baltik dengan menggunakan perpaduan kapasitas ketahanan nasional sebuah negara mulai dari kapasitas militer secara konvensional yang mencakup intelejen, dukungan terhadap pemberontak lokal, pengerahan personil militer gerilya dan penerjunan personil militer khusus hingga agitasi, propaganda dan mengeksploitasi “potensi konflik” pada populasi target. Strategi perang ini berbeda dengan strategi perang konvensional karena bersifat multidimensi, asimetris dan menciptakan kerentanan jangka panjang. Pendekatan perang

hibrida diproyeksikan mampu menciptakan medan operasi militer pada wilayah target di masa damai yang dapat dikontrol sebagai ruang operasional apabila di masa mendatang konflik yang sebenarnya terjadi. Strategi perang seperti ini dapat melemahkan target tanpa harus melakukan konfrontasi secara terbuka. (Tulak, 2016)

Manuver taktis yang ditunjukkan Rusia membuat ketiga negara Baltik khawatir akan ancaman dan potensi destabilisasi yang ditimbulkan terhadap keamanan kawasannya sehingga perlu adanya upaya bersama untuk mengusahakan proses sekuritisasi dari potensi ancaman yang dilakukan oleh Rusia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini kemudian dibuat dengan menawarkan analisis dan bahasan yang berfokus pada strategi negara-negara Baltik dalam menyikapi keamanan kawasannya terhadap Rusia pasca konflik Krimea. Terdapat beberapa penelitian yang menuliskan permasalahan serupa antara lain : *Respon Negara-Negara Baltik Terhadap Ancaman Rusia Pasca Aneksasi Crimea* yang ditulis oleh Ariski Aznor (2018), menjelaskan respon negara-negara Baltik terhadap ancaman Rusia pasca aneksasi Krimea. Penelitian lain yang ditulis oleh Syafitri Ramadhani (2019) dengan judul *Reaksi Ofensif Rusia Dalam Menghadapi NATO Pasca Konflik Krimea Tahun 2014-2017*, menjelaskan mengenai reaksi ofensif Rusia terhadap NATO yang secara aktif memperkuat aliansinya di Eropa Timur khususnya melalui negara-negara Baltik. (Ramadhani, 2019) Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melihat bahwa terdapat kebaharuan substansi dari penelitian Strategi Negara-negara Baltik Dalam Menyikapi Keamanan Kawasan Terhadap Rusia Pasca Konflik Krimea.

Penelitian ini menggunakan teori Regional Security Complex (RSCT) atau teori kompleks keamanan kawasan yang didefinisikan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam buku *Regions and Powers: The Structure of International Security* (2003). Teori ini menjelaskan mengenai relasi dan interaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih aktor yang berada dalam satu ruang lingkup geografis terbatas karena memiliki keterkaitan masalah keamanan yang terkoneksi dan tidak dapat ditangani atau diekstraksi secara independen sehingga membuat tingkat interdependensi keamanan antar aktor didalamnya menjadi lebih intens dan menimbulkan pola hubungan Amity dan Emity. Amity merupakan pola interaksi yang terjalin atas dasar kesamaan persepsi dan orientasi yang membuat iklim hubungan antar aktor menjadi saling melengkapi, mendukung dan melindungi. Sedangkan Enmity merupakan pola interaksi yang didasarkan pada sentimen permusuhan, kecurigaan dan kekhawatiran akan ancaman dari aktor terdekat. (Buzan & Woever, *Regions and Powers : The Structures of International Security*, 2003)

Penelitian ini disusun dengan metode penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan penalaran secara induktif dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti. Dalam pendekatan ini, permasalahan penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teori dan data untuk menarik kesimpulan yang dilakukan melalui generalisasi empiris. Metode kualitatif lebih berfokus untuk mencari dan menemukan penjelasan serta makna dari fenomena yang diteliti sehingga ketajaman dalam penelitian kualitatif akan sangat bergantung pada proses pengamatan fenomena, analisis dan kekuatan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. (Sugiyono, 2015) Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Tipe ini akan berfokus untuk mendeskripsikan fenomena atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti disertai dengan data empiris dan kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori dan konsep untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Sejak negara-negara Baltik menyatakan keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO sebagai tujuan strategis kebijakan luar negeri mereka, langkah negara-negara Baltik membuat Moskow menjadi geram karena perluasan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan NATO sudah berada di gerbang utama negara mereka. Mengingat, sebelumnya Rusia melalui Presiden Boris Yeltsin telah menawarkan jaminan keamanan kepada negara-negara Baltik apabila mereka berhenti berharap kepada NATO, namun tawaran tersebut kemudian ditolak. (Banka, 2019) Negara-negara Baltik melihat keanggotaan NATO sebagai satu-satunya kemungkinan jaminan permanen keamanan mereka. Rusia menggambarkan perluasan NATO terhadap negara-negara Baltik sebagai tantangan utama bagi keamanannya sendiri. Sementara itu, komunitas Euroatlantik tidak siap menawarkan jaminan keamanan kepada negara-negara Baltik, karena takut akan reaksi permusuhan dengan Rusia. (Paulauskas, 2006)

Negara-negara Baltik telah menjadi arena baru peperangan yang lebih lunak antara Rusia dan NATO, hal tersebut membuat negara-negara Baltik menjadi semakin rentan akan ancaman yang sifatnya multi-vektor yang konstan, mengingat bahwa Rusia secara konsisten berupaya untuk menyebarkan determinasinya dengan melakukan operasi intelejen hingga melancarkan kampanye-kampanye non-militer di negara-negara Baltik. Dalam beberapa tahun terakhir, Kremlin telah melanjutkan upayanya untuk melemahkan negara-negara Baltik melalui berbagai metode konflik sub-konvensional, termasuk perang politik, operasi informasi yang menuduh pemerintah Baltik mendiskriminasi penutur Rusia, penetapan harga energi yang tidak menguntungkan, pelanggaran reguler terhadap perairan teritorial negara Baltik. dan ruang udara, dan penculikan seorang perwira keamanan Estonia pada tahun 2014. (Kangsepp & Rossi, 2014)

Selain itu, Rusia juga disinyalir secara aktif memainkan kekuatan sibernya selama beberapa dekade terakhir dengan serangan dunia maya yang begitu agresif. Pada tahun 2007, parlemen Estonia, beberapa kementerian, lembaga media, dan bank mengalami serangkaian serangan dunia maya yang parah atas sikap negara tersebut dalam merelokasi monumen era Soviet di ibu kota Tallinn. Kemudian, dugaan peretasan yang dilakukan oleh cracker pro Rusia juga pernah menyerang beberapa fasilitas vital dari negara-negara Baltik. (Kampmark, 2021) Pada akhir 2015, gerbang Internet yang digunakan untuk mengontrol jaringan listrik wilayah Baltik diserang oleh peretas yang bertujuan untuk mengganggu operasi tetapi tidak sampai menyebabkan pemadaman. (Jewkes & Vukmanovic, 2017) Serangan DDoS juga pernah diterima oleh sistem distribusi bensin wilayah Baltik yang mengoordinasikan pengiriman dari tangki penyimpanan ke jaringan pompa bensin. Serangan ini dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan tujuan untuk mengacaukan distribusi pengiriman bensin. STEC atau konverter serial-ke-ethernet sebagai perangkat komunikasi jaringan yang dimiliki oleh negara-negara Baltik juga pernah menjadi sasaran cracker yang disinyalir berasal dari Rusia. (Paganini, 2017)

Berdasarkan konsep persepsi ancaman yang diajukan oleh Stephen Walt, tindakan yang dilakukan Rusia telah memenuhi 4 faktor utama dari sumber ancaman terhadap negara-negara Baltik.

1. *Geographic proximity* atau kedekatan wilayah, jarak Tallin, Ibukota Estonia dan Riga, ibukota Latvia dengan wilayah terluar dari Rusia, tidak lebih dari 350 km. Bahkan ibukota Lithuania, jaraknya sangat dekat dengan bagian terluar dari sekutu Rusia, Belarus, tidak lebih dari 100 km. Hal tersebut merupakan permasalahan yang serius bagi ketiga negara Baltik karena Rusia memiliki ruang yang luas dan fleksible dalam menjangkau kota-kota penting apabila suatu saat

melancarkan agresinya, baik melalui jalur darat maupun udara. Kedekatan wilayah juga memberikan keuntungan yang strategis bagi Rusia dalam melancarkan provokasi dan propaganda terhadap para penutur Rusia di ketiga Negara Baltik sehingga mobilisasi taktis dapat dimulai untuk melemahkan ketahanan nasional negara target. Keberadaan penutur Rusia menjadi potensi ancaman yang nyata, total penutur Rusia yang berada di Latvia mencapai 26,9 persen dan Estonia 24,6 persen. Sedangkan Lithuania memiliki jumlah penutur Rusia yang paling sedikit dengan 5,8 persen dari total populasi. (Radin, 2017) Artileri dan roket Rusia sebagai *long distance military support* akan dengan mudah menysasar objek vital milik negara-negara Baltik sehingga agregat kekuatan militer ketiga negara Baltik mengalami penurunan yang signifikan, strategi yang sama dilakukan Rusia ketika melancarkan agresi militernya di Ukraina pada awal tahun 2022.

2. *Perceived Intentions*, Rusia secara terbuka telah memperjelas tujuannya terhadap sekutu NATO di Eropa Timur. Penggunaan strategi perang hibrida yang melibatkan elemen-elemen non-militer seringkali digunakan untuk menciptakan ketidakstabilan, terutama pada ketiga negara Baltik. Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan sikap Rusia yang dinilai semakin mengkhawatirkan karena Rusia menjadi semakin aktif dalam memperkuat postur dan aktivitas militernya di kawasan Baltik dengan mengadakan latihan perang Armada Baltik serta memperbanyak *military deployment* dengan menempatkan personel militer, alat utama sistem senjata dan unit-unit rudal Iskander yang berhulu ledak nuklir ke Kaliningrad, kota di pantai Baltik yang terletak di antara Polandia dan Lithuania. Selain itu, ancaman berupa agitasi dengan memanfaatkan persebaran penutur di negara-negara Baltik juga berpotensi memunculkan gelombang pemberontakan dan konflik asimetris yang mengancam kedaulatan negara mereka, terutama bagi negara Estonia dan Latvia sebab kedua negara tersebut merupakan tetangga dekat yang memiliki sejarah, pengaruh politik dan kultural Rusia yang kuat. (Braub & Racz, 2021)
3. *Offensive Power*, meningkatnya potensi ancaman Rusia terhadap negara-negara Baltik selama satu dekade terakhir, secara garis besar dimulai pasca terjadinya konflik Krimea. Negara-negara Baltik melihat Rusia menjadi semakin agresif dan berani melanggar banyak perjanjian internasional termasuk melanggar prinsip politik fundamental keamanan Euro-Atlantik. Rentetan langkah yang diambil Rusia di wilayah barat telah menunjukkan kesediaannya untuk mencapai tujuan geopolitiknya bahkan dengan ancaman dan penggunaan kekuatan, selama Rusia dapat melakukannya dengan apa yang dianggapnya sebagai risiko yang dapat dikelola. Tindakan ini secara mendasar telah mengubah arah geopolitik karena ketiga negara Baltik mempersepsikan Rusia sebagai salah satu ancaman utama keamanan mereka..
4. *Aggregate Power*, setelah perang melawan Georgia pada 2008, selama satu dekade terakhir, Rusia secara sistematis telah memodernisasi angkatan bersenjata, khususnya untuk meningkatkan kesiapan pasukan militer konvensional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perombakan pada sektor militer adalah elemen inti dari strategi Rusia, dilengkapi dengan peningkatan yang stabil dalam anggaran pertahanannya secara riil hampir terus menerus hingga 2015. Menurut International Institute for Strategic Studies (IISS), pada 2018 dan 2019, sekitar 35 persen hingga 40 persen dari total pengeluaran militer Rusia

didedikasikan untuk modernisasi kekuatan militernya. (McDermott & Bartles, 2020) Saat ini angkatan bersenjata Rusia dipandang sebagai kekuatan yang paling mampu dan fungsional sejak akhir Perang Dingin. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak ahli, salah satu tujuan utama reformasi pertahanan dan transformasi militer Rusia yang sedang berlangsung adalah untuk meningkatkan kesiapan dan efektivitas angkatan bersenjata. Pimpinan militer Rusia dilaporkan telah berusaha keras untuk mengembangkan konsep preventive military action dalam beberapa tahun terakhir, yang bertujuan untuk mengkompensasi kekurangan kemampuan konvensional militernya.

Dalam menghadapi ancaman Rusia yang dianggap semakin agresif pasca konflik Krimea, negara-negara Baltik perlu menggunakan pendekatan regional dalam menyikapi permasalahan keamanannya. Menurut RSCT, berbagai pendekatan regional yang diinisiasi oleh ketiga negara Baltik merupakan strategi yang ideal dalam menghadapi ancaman terhadap kewasannya, termasuk agresivitas Rusia. Negara-negara Baltik tidak dapat mengatasi permasalahan keamanannya sendiri apabila Rusia melancarkan skenario terburuknya ke negara-negara Baltik. Karena dari segi manapun, kekuatan negara-negara Baltik tidak akan sepadan apabila harus berhadapan dengan Rusia. Dalam perang konvensional misalnya, jika dilihat dari akumulasi kekuatan militer, ketiga negara Baltik akan mengalami kekalahan telak apabila dikalkulasi menggunakan perhitungan strategis. Mengingat, peringkat kekuatan militer Rusia berada pada posisi ke 2 dunia sedangkan ketiga negara Baltik berturut-turut diposisi ke 85, 95, dan 108 dunia. (Global Firepower, 2022) Selain itu, pelibatan operasi intelejen oleh Rusia tentunya akan meningkatkan efektivitas serangan karena objek dan target vital dapat diidentifikasi terlebih dahulu pada tahap pra-serangan. Hal tersebut belum mencakup kondisi rentan yang sengaja diciptakan Rusia melalui operasi hibrida yang ditujukan untuk menciptakan ruang yang lebih besar dalam mencapai tujuan strategisnya. Oleh karena itu, pendekatan regional yang dilakukan oleh negara-negara Baltik akan meningkatkan jumlah sokongan dalam segala aspek apabila Rusia melancarkan skenario terburuknya. Sokongan ini tidak hanya berasal dari antar sesama negara-negara Baltik saja tapi juga dari mitra-mitranya.

Dalam menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan regionalnya, negara-negara Baltik sebenarnya memiliki beberapa strategi yang sudah diimplementasikan sejak lama. Namun, beberapa kebijakan baru kemudian terbentuk sebagai solusi untuk melengkapi kerentanan yang ada. Dalam internal negara-negara Baltik, format dan kerangka resmi kerjasama pertahanan regional sudah terbentuk melalui terbentuknya Ministerial Committee (Komite Menteri), Policy Coordination Committee (Komite Koordinasi Kebijakan), Defence Coordination Committee (Komite Koordinasi Pertahanan) dan Baltic Military Committee (Komite Militer Baltik). Ministerial Committee memberikan pedoman politik dan mengadopsi keputusan kunci dalam kerjasama trilateral di bidang pertahanan. Jika perlu, menteri dari sekutu atau negara mitra lain dapat diundang ke pertemuan ini. Policy Coordination Committee terdiri dari direktur kebijakan kementerian pertahanan, pertemuan pada komite ini dapat diselenggarakan kapan saja atau sesuai dengan instruksi Ministerial Committee dan mengambil keputusan sesuai kompetensinya. Komite ini mengoordinasikan dan menjaga kerjasama pada tingkat strategis, menyelenggarakan pertemuan Ministerial Committee, dan mengontrol pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Ministerial Committee. Ministerial Committee terdiri dari para menteri pertahanan dari tiga negara Baltik. Defence Coordination Committee terdiri dari kementerian nasional dan perwakilan angkatan bersenjata. Komite melaksanakan pelaksanaan keputusan yang diambil di tingkat tertinggi dan melapor

kepada Baltic Military Committee dan Ministerial Committee. Baltic Military Committee terdiri dari komandan dan kepala staf angkatan bersenjata negara-negara Baltik, termasuk kekuatan militer yang lebih tinggi. Komite ini melaksanakan keputusan para menteri, melakukan evaluasi menyeluruh dari sudut pandang militer, dan memberikan rekomendasi kepada para menteri dan pedoman militer kepada Defence Coordination Committee. (Ministry of Defence Republic of Latvia, 2019) Penyelenggaraan kerjasama dan pelatihan bersama merupakan aspek utama dalam pertahanan regional negara-negara Baltik. Ini disusun dan dikembangkan sesuai dengan dinamika yang dihadapi oleh ketiga negara Baltik dari waktu ke waktu demi melengkapi kapasitas dan kualitas keamanan kolektifnya.

Format Kerjasama Keamanan Negara-negara Baltik

Dalam menghadapi Rusia pasca konflik Krimea, negara-negara Baltik sudah memiliki format kerjasama militer yang dibentuk lebih dari satu dekade sebelum konflik Krimea terjadi. Kerjasama ini tentunya memberikan keuntungan strategis bagi negara-negara Baltik dalam menghadapi ancaman Rusia karena ketiga negara tersebut telah memiliki kerangka dan tata kelola yang jelas dalam menghadapi ancaman serta konflik yang potensial karena ketiga negara Baltik tidak bisa menghadapi permasalahan keamanan kawasannya secara terpisah. Menurut kepala Estonian Defence Forces, Mayor Jenderal Martin Herem, menyatakan bahwa negara-negara Baltik harus diperlakukan sebagai satu wilayah operasi dengan pendekatan yang lebih regional dari pada harus terpisah secara nasional. Pendekatan tersebut menjadi relevan karena kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh ketiga negara Baltik menjadi saling terkait selama beberapa dekade terakhir. (Van Tol, Bassler, Elgin, & Hacker, 2022)

Dalam hal pendidikan militer, menteri pertahanan Baltik pada tahun 1992 setuju dengan konsep kerjasama dibidang pendidikan militer yang dikhususkan untuk melatih perwira dan spesialis dari ketiga negara Baltik serta negara mitra. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pendirian lembaga pendidikan bersama setingkat sekolah tinggi yang bernama Baltic Defence College (BALTDEFCOL) pada tahun 1999. Fungsi dari sekolah ini sebagai pusat penelitian strategis dan operasional yang menyediakan pendidikan militer profesional, berfokus pada strategi, keamanan, dan pertahanan negara. BALTDEFCOL menyelenggarakan seminar meja bundar dan konferensi besar setiap tahun, termasuk Konferensi Dunia Maya dan Konferensi tentang 'Proyeksi kekuatan' Rusia sebagai salah satu sumber ancaman yang realistis. (Baltic Defence College, 2014)

Dalam pertahanan darat, negara-negara Baltik memiliki Baltic Battalion (BALBAT) yang didirikan pada tahun 1994 dengan tujuan untuk meningkatkan interoperabilitas NATO dari pasukan pertahanan negara-negara Baltik serta sebagai katalis untuk peningkatan standar militer secara umum. Hadirnya BALBAT juga menunjukkan kemauan dan kemampuan negara-negara Baltik untuk bekerja sama baik di antara sesama negara Baltik maupun dalam lingkungan multinasional yang lebih luas. Kemudian, format ini dikembangkan lagi menjadi Baltic Joint Battalion Unit (BALTFOR) yang merupakan gabungan dari unit-unit pasukan darat negara-negara Baltik yang berpartisipasi dalam pelatihan bersama secara teratur, dan ini memengaruhi pemeliharaan kompatibilitas timbal balik pada tingkat tinggi hubungan negara-negara Baltik. (Jakniunaite, 2016)

Dalam pertahanan laut, negara-negara Baltik memiliki format yang dinamakan The Baltic Naval Squadron (BALTRON) yang didirikan pada tahun 1998 dengan tanggung jawab utama untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara Baltik di

bidang pertahanan dan keamanan angkatan laut. Melalui BALTRON negara-negara Baltik memiliki kesiapan konstan untuk menghadapi potensi ancaman yang hadir di wilayah laut Baltik dengan bekerjasama dengan NATO. Dalam proyek ini, BALTRON memiliki Navy Training Base of the Baltic States yang terdiri dari beberapa unit struktural dengan berbagai fungsi, seperti Mine Countermeasure School, Mine Countermeasure Equipment Workshop, Diving School, and Gunnery Equipment Workshop. Semua unit itu, bertempat di Latvia dan Lithuania. (Ministry of Defence Republik of Latvia, 28)

Dalam pertahanan udara, ketiga negara Baltik sudah memiliki jaringan pengawasan udara melalui Baltic Air Surveillance Network (BALTNET), proyek ini diluncurkan pada tahun 2000. BALTNET adalah sistem untuk akuisisi, koordinasi, distribusi dan tampilan data pengawasan udara di ketiga negara Baltik. BALTNET menggabungkan upaya banyak negara dan merupakan bagian dari rencana internasional yang lebih luas dengan tujuan mengembangkan pengawasan udara dan keahlian kontrol udara di Eropa Tengah dan Timur. Upaya tersebut dikoordinasikan melalui Regional Airspace Surveillance Co-ordination Centre (RASCC) di Lithuania yang akan menerima, memproses, dan menampilkan data radar primer dan sekunder di tiga negara Baltik, memulai pelacakan dan identifikasi semua pesawat dalam jangkauan radar dan mengkoordinasikan pertukaran informasi regional dengan pihak ketiga. Data radar yang diberikan kepada BALTNET tetap menjadi milik nasional negara penyedia, tetapi aset BALTNET dapat digunakan untuk pertukaran gambar udara dengan NATO dan/atau masing-masing negara. (Republic OF Estonia Defence Force, 2019)

Peran NATO Dalam Meningkatkan Kekuatan Strategis Negara-negara Baltik Pasca Konflik Krimea

Namun dalam skenario yang tidak ideal, terdapat tantangan yang membuat pertahanan regional negara-negara Baltik menjadi rentan dan tidak optimal. Misalnya, masalah yang berkaitan dengan penempatan dan pembagian kekuatan militer nasional untuk pertahanan regional. Masalah ini muncul akibat dari ketimpangan kekuatan militer antar negara-negara Baltik. Ini menimbulkan beberapa keberatan yang dapat dipahami, karena sulit untuk menemukan susunan formasi pertahanan yang ideal untuk keamanan regional. Karena setiap negara memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kendali operasional atas kekuatan nasional dengan berfokus pada pertahanan preferensial terhadap objek vital serta populasi mereka sendiri. Ketiga negara Baltik saat ini memiliki strategi nasional yang agak berbeda. Pendekatan masing-masing negara secara keseluruhan untuk mengoptimalkan strategi pertahanannya sendiri sepenuhnya dapat dimengerti sebab tidak ada negara yang memprioritaskan keamanan negara lain dari pada keamanan nasionalnya, terlepas dari kedekatan historis yang sejak lama sudah terbangun. Oleh karena itu, pada dasarnya sulit untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan ini tanpa kompromi yang tampaknya tidak realistis secara politik. (Hooker, 2019) Tantangan ini tentunya menjadi permasalahan serius bagi ketiga negara Baltik, khususnya dalam menyikapi agresivitas Rusia. Diperlukan strategi dan mekanisme pertahanan kolektif yang lebih kompleks dengan berintegrasi pada kekuatan yang lebih besar untuk melengkapi struktur pertahanan negara-negara Baltik.

Dalam merespon tantangan tersebut, Janis Sarts, sekretaris negara kementerian pertahanan Latvia mengutarakan bahwa negara-negara Baltik membutuhkan kehadiran NATO dalam skala yang lebih besar dalam menghadapi Rusia.

“We will now take immediate steps to increase the intensity of NATO drills here.

We want to have a larger presence of NATO's forces as soon as we can,” (Gelzis, 2014)

Narasi yang sama juga diutarakan oleh Menteri Pertahanan Estonia, Urmas Reinsalu. Menurut pendapatnya, upaya mitigasi yang dianggap paling solutif dalam waktu dekat menghadapi kemungkinan yang lebih buruk dari agresivitas Rusia adalah kehadiran pasukan NATO secara permanen. Atau, apabila hal tersebut masih belum dapat tercapai maka paling tidak dibutuhkan rotasi unit militer sebagai gantinya.

“If their permanent presence is not possible, then rotating army units would be good [instead].” (Gelzis, 2014)

Keresahan yang dialami negara-negara Baltik kemudian menjadi salah satu topik bahasan pada KKT NATO pada tahun 2014 di Wales. Menteri Pertahanan Jerman, Polandia, dan Denmark sepakat untuk merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Multinational Corps Northeast (MNC-NE) dari markas besar pasukan kesiapan rendah ke markas besar pasukan tingkat tinggi. Peningkatan ini dianggap perlu sebagai upaya preventif dalam mengatasi ancaman dan tantangan dimasa depan. Gagasan tersebut menghasilkan sebuah kerangka koordinasi pertahanan bersama yang bernama Readiness Action Plan (RAP) yang merupakan garis dasar dan postur pencegahan NATO. Kerangka ini memfasilitasi proses adaptasi dan jaminan pertahanan aliansi NATO di wilayah timur laut melalui jaringan komando dan kontrol atas NATO Response Force (NRF) yang dilengkapi dengan satuan tugas Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Didalam kerangka RAP juga membahas mengenai kehadiran NATO Force Integration Units (NFIU). (Arnold, 2016)

Segala tindakan yang diambil NRF harus mengikuti instruksi dari The Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) melalui Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) sebagai salah satu dari dua komando strategis NATO. NRF dan VJTF terdiri dari pasukan multinasional gabungan yang mampu bereaksi dalam waktu singkat terhadap berbagai aspek keamanan mulai dari manajemen krisis hingga pertahanan kolektif, satuan ini terdiri dari komponen darat, udara, laut, dan pasukan operasi khusus. Secara keseluruhan, setelah konflik Krimea, satuan NRF ditingkatkan menjadi sekitar 40.000 personil. VJTF merupakan sebagai garda terdepan dalam mengatasi ancaman atau serangan musuh. Latihan pengerahan VJTF untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2015 di Polandia dan secara teratur akan terus di evaluasi menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. (Nikers, 2022)

Salah satu bagian terpenting dari kebijakan RAP adalah menghadirkan NATO Force Integration Unit (NFIU) yang merupakan suatu upaya adaptasi NATO terhadap struktur dan kondisi militer dari negara sekutunya yang dianggap rentan. Dibandingkan dengan pangkalan militer, NFIU lebih dapat dikatakan sebagai unit atau markas kecil yang bertujuan untuk membantu memfasilitasi pengerahan satuan VJTF ke zona konflik, mendukung perencanaan pertahanan kolektif, dan membantu mekoordinasikan latihan militer. NFIU berfungsi sebagai penghubung yang mengintegrasikan pasukan nasional dan pasukan NATO. (Allied Joint Force Command Brunssum, 2020) Setiap NFIU akan diisi oleh sekitar 20 staf nasional dan 20 staf multinasional NATO. Gelombang pertama dari enam unit NFIU telah aktif beroperasi sejak tahun 2015, kemudian bertambah dua unit pada tahun 2016. NFIU berbasis di Sofia (Bulgaria), Tallinn (Estonia), Riga (Latvia), Vilnius (Lithuania), Bydgoszcz (Polandia), Bukares (Rumania), Szekesfehervar (Hongaria) dan Bratislava (Slovakia).

Menindak lanjuti RAP yang sebelumnya sudah dibentuk, KTT NATO pada tahun 2016 di Warsawa menghasilkan keputusan untuk membentuk empat kelompok tempur batalion multinasional yang bermarkas di Estonia, Latvia, Lithuania dan Polandia. Kelompok tempur ini masing-masing dipimpin oleh Inggris, Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat. Keempat kelompok tempur tersebut berada di bawah komando NATO, melalui Multinational Corps Northeast (MNC-NE) di Szczecin, Polandia. Multinational Division-North East (MND-NE) di Elblag, Polandia, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pelatihan dan persiapan dari empat batalion ini. Proyek ini dinamakan Enhanced Forward Presence (eFP) atau kehadiran NATO yang ditingkatkan, eFP merupakan implementasi dari konsep pertahanan kolektif NATO, batalion eFP terdiri dari personel militer negara tuan rumah dan multinasional. Hadirnya eFP semakin memperkuat peranan NFIU di negara tuan rumah. Batalion eFP Estonia dipimpin oleh Inggris dan didukung oleh Denmark, Perancis, dan Islandia. Batalion eFP Latvia dipimpin oleh Kanada dan didukung oleh Albania, Ceko, Italia, Montenegro, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan Spanyol. Batalion eFP Lithuania dipimpin oleh Jerman dan didukung oleh Belgia, Ceko, Islandia, Belanda, dan Norwegia. Batalion eFP Polandia dipimpin oleh Amerika Serikat dan didukung oleh Kroasia, Romania, dan Inggris. (Czulda, 2019)

Sejak pertama kali dibentuk, batalion eFP di ketiga negara Baltik didukung sekitar 3000 personel multinasional NATO yang dilengkapi dengan kekuatan militer taktis dan mekanis. (Hawser & Zwilling, 2017) Komposisi dari batalion ini dapat berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan tanggungjawab dan tantangan yang harus dihadapi.

Hadirnya kebijakan RAP dan terbentuknya eFP NATO merupakan upaya responsif terhadap aksi Rusia pasca konflik Krimea. Secara politis, ini tentunya akan meyakinkan para sekutu NATO yang paling rentan terhadap ancaman Rusia, seperti negara-negara Baltik bahwa aliansi NATO berkomitmen untuk menjaga kedaulatan mereka. Kehadiran kekuatan militer NATO di negara-negara Baltik juga dapat diterjemahkan sebagai keberhasilan negara-negara Baltik dalam mengimplementasikan strategi keamanan kolektifnya melalui pendekatan regional dalam menghadapi potensi ancaman dari Rusia pasca konflik Krimea.

Peran OSCE Sebagai Upaya Preventif Dalam Menjaga Stabilitas Hubungan Negara-negara Baltik Dengan Rusia

Interaksi pertama kali negara-negara Baltik dengan OSCE terjadi ketika dua negara Baltik, yaitu Estonia dan Latvia membutuhkan bantuan OSCE untuk mendukung dan membantu proses pembangunan kedua negara tersebut pasca kemerdekaannya, khususnya berkaitan dengan proses imigrasi dan krisis minoritas yang berpotensi untuk memicu konflik dengan Rusia. Lithuania tidak termasuk dalam aktor yang menjadi bagian dari resolusi karena negara ini memiliki jumlah etnis Rusia yang tidak signifikan jika dibanding dengan kedua negara Baltik lainnya. OSCE memiliki tanggungungan untuk menyelesaikan masalah penarikan pasukan bekas Soviet dan integrasi kelompok penduduk non-etnis yang tinggal di negara-negara Baltik untuk mengamankan kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara tersebut.

Misi OSCE terhadap negara-negara Baltik dan Rusia diakomodir melalui KTT Helsinki tahun 1992. Melalui misi ini OSCE meminta kedua pihak untuk membuat perjanjian dan kesepakatan yang terjadwal mengenai imigrasi dan krisis minoritas. Melalui misi ini, OSCE berperan aktif dalam membuka ruang-ruang politik sebagai jembatan untuk mempromosikan stabilitas hubungan antara negara-negara Baltik dan Rusia. Menindaklanjuti proposal yang dibuat oleh pemerintah Estonia, OSCE kemudian

menjalankan misi residen di Tallin untuk mempromosikan forum dialog antara komunitas penutur bahasa Rusia dengan pemerintah Rusia di Estonia. Misi yang sama juga diluncurkan ke Latvia pada November tahun 1993. Dalam permasalahan ini, OSCE dihadapkan pada kesulitan dan tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan dalam tindakan pencegahan, tetapi tiga tahun kemudian, upaya OSCE mulai menunjukkan potensi keberhasilan tindakan tersebut dimana implementasi penarikan pasukan Rusia secara keseluruhan telah dilakukan dari wilayah negara-negara Baltik. (OSCE, 1995)

Di Estonia, OSCE diminta untuk menunjuk perwakilan komisi pemerintah untuk pensiunan militer, yang harus memutuskan masalah status yang sangat sulit dari orang-orang ini. Di Latvia, bantuan OSCE mencakup area lebih lanjut. OSCE telah diminta untuk memantau pelaksanaan perjanjian antara Latvia dan Federasi Rusia mengenai pengoperasian stasiun radar Skrunda, perjanjian ini mencakup pembongkaran stasiun. OSCE berperan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pembahasan implementasi dari perjanjian Skrunda. OSCE bertugas untuk melakukan inspeksi secara berkala dan memantau implementasi dari perjanjian. Di Estonia, OSCE diundang untuk menunjuk perwakilan di Latvia untuk membantu pelaksanaan perjanjian terkait kesejahteraan sosial pensiunan militer dan anggota keluarga mereka. OSCE juga terlibat dalam meredakan masalah yang berpotensi untuk memicu ketegangan terkait dengan perwira militer Rusia yang seharusnya meninggalkan negara itu tetapi terus tinggal di sana secara ilegal. Perlu dicatat bahwa Rusia dan Latvia telah menunjukkan moderasi dalam menangani masalah ini. Tindakan ekstrim seperti pengusiran sejauh ini telah dihindari. Diskusi informal telah dilakukan di Wina dan di tempat lain, tentunya dengan bantuan OSCE. Para Pihak telah didorong untuk memanfaatkan sepenuhnya saran dan jasa baik OSCE, dan, meskipun masalah tersebut belum sepenuhnya diselesaikan, lebih banyak waktu telah diberikan untuk menemukan solusi yang dapat diterima. Melalui aksinya yang paling terlihat di Latvia dan Estonia, yaitu misi residennya, OSCE telah berkontribusi pada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan status non-warga negara dan integrasi penutur non-pribumi. Dengan demikian, ketegangan yang selama ini mengganggu hubungan antara negara-negara Baltik dan Rusia dapat diredakan.

OSCE merupakan pihak ketiga yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif sebagai fasilitator. OSCE terbukti mampu menjaga hubungan baik antara negara-negara Baltik dengan Rusia melalui serangkaian upaya preventif dengan mengedepankan ruang-ruang diplomasi namun tidak semua kasus OSCE dapat bekerja secara ideal. Dalam kasus terbaru di awal 2022, Melalui OSCE negara-negara Baltik meminta Rusia dan Belarusia untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan mengenai latihan militer Union Resolve-2022 yang sedang berlangsung didekat wilayah Baltik Permintaan dibuat berdasarkan Bab 3 Dokumen OSCE Vienna tentang Pengurangan Risiko. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara peserta OSCE untuk meminta informasi dari negara-negara lain tentang aktivitas pasukan militer yang tidak biasa, tidak terencana, dan signifikan di luar lokasi biasanya di masa damai yang menjadi perhatian keamanan. Kementerian pertahanan Latvia mengatakan bahwa Belarus sebagai *host nation* dari Resolve-2022 tidak memiliki jawaban yang sesuai dari pertanyaan negara-negara Baltik. Ketiga negara Baltik, kemudian meminta untuk mengajukan pertemuan dengan Belarusia 48 jam setelah menerima tanggapan. Namun, Belarusia menolak dan menyatakan bahwa latihan militer tidak melibatkan lebih dari 13.000 tentara, yang merupakan ambang batas untuk memberikan informasi dalam Dokumen Wina. Namun, Kementerian Pertahanan Latvia mengatakan bahwa Rusia dan Belarusia telah melanggar Dokumen Wina. (Latvian Public Broadcasting, 2022)

Berkaitan dengan stabilitas hubungan antara negara-negara Baltik dengan Rusia, OSCE masih dianggap mampu untuk berkontribusi dalam menjaga hubungan antara kedua pihak. Namun, tidak ada indikator pasti yang menunjukkan bahwa tindakan OSCE akan menjadi solusi yang efektif yang menjamin keamanan kawasan negara-negara Baltik. Mengingat bahwa resolusi dan saran yang diberikan OSCE tidak bisa mengikat sehingga permasalahan yang berkaitan dengan legitimasi dari setiap resolusi dan saran dari OSCE seringkali di pertanyakan. Kehadiran OSCE tentunya berkontribusi bagi keamanan negara-negara Baltik tapi tidak dapat meredakan kekhawatiran negara-negara Baltik terhadap agresivitas Rusia pasca hadirnya konflik Krimea.

KESIMPULAN

Aksesinya ketiga negara Baltik menjadi anggota NATO dan Uni Eropa telah menciptakan ketegangan yang konstan selama hampir dua dekade terakhir. Hadirnya beberapa konflik yang melibatkan agresi militer Rusia, seperti konflik Georgia dan kemudian konflik Krimea telah memberikan gambaran yang meresahkan bagi negara-negara Baltik. Ini juga diperkuat dengan adanya beberapa kampanye propaganda dan provokasi yang sering diterima oleh ketiga negara Baltik melalui ancaman hibrida. Negara-negara Baltik tidak ingin nasibnya sama seperti Krimea yang berhasil diambil alih oleh Rusia. Berdasarkan hal tersebut, ketiga negara Baltik berupaya untuk menggunakan pendekatan regional untuk mendapatkan jaminan keamanan kolektif, terutama dari NATO. Jaminan keamanan ini juga didukung oleh aliansi NATO lainnya karena eskalasi agresivitas Rusia di Eropa Timur telah meningkat pasca konflik Krimea. Jaminan ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan Readiness Action Plan (RAP) yang disahkan melalui KTT NATO pada tahun 2014 di Wales dan terbentuknya Enhanced Forward Presence (eFP) melalui KTT NATO pada tahun 2016 di Warsawa. Kehadiran dan integrasi kekuatan militer NATO di ketiga negara Baltik serta meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Multinational Corps Northeast (MNC-NE) telah memperlengkapi postur kekuatan militer negara-negara Baltik. Selain itu, negara-negara Baltik secara geopolitik memiliki nilai tawar yang tidak dapat diabaikan Rusia apabila negara tersebut memiliki agenda untuk melakukan agresi ke kawasan negara Baltik, karena menyerang negara-negara Baltik sama saja mengaktifkan jaminan keamanan kolektif pada Pasal 5 Perjanjian Washington. Kemudian, sebagai organisasi keamanan dan kerjasama kawasan Eropa OSCE juga menjadi salah satu opsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya. Namun, ini tidak menjamin bahwa Rusia tidak akan melakukan upaya-upaya agresif ke negara-negara Baltik. Mengingat bahwa kebijakan militer Rusia bersifat mutlak dan tidak dipengaruhi entitas manapun termasuk resolusi dan saran OSCE. Ini dibuktikan dari pecahnya konflik Krimea pada tahun 2014.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.I.P., M.P.S. selaku dosen pembimbing 2 dan Ibu Palupi Anggraheni, S.I.P., M.A. selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Allied Joint Force Command Brunssum. (2020). *NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU)*

- FACT SHEET*. Retrieved from JFCBS NATO: <https://jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nato-force-integration-units-fact-sheet>
- Arnold, J.-M. (2016). NATO's Readiness Action Plan: Strategic Benefits and Outstanding Challenges. *Strategic Studies Quarterly*, 74-105.
- Baltic Defence College. (2014, November 12). *'International Conference on Russian 'Power Projection'*. Retrieved from Baltic Defence College: <https://web.archive.org/web/20141112234256/http://www.baltdefcol.org/russianpowerprojection/>
- Banka, A. (2019, Oktober 4). *THE BREAKAWAYS: A RETROSPECTIVE ON THE BALTIC ROAD TO NATO*. Retrieved from WAR ON THE ROCKS: <https://warontherocks.com/2019/10/the-breakaways-a-retrospective-on-the-baltic-road-to-nato/>
- Braub, H., & Racz, A. (2021, Januari 2021). *Russia's Strategic Interest and Actions In the Baltic Region*. Retrieved from DGAP: <https://dgap.org/en/research/publications/russias-strategic-interests-and-actions-baltic-region>
- Buzan, B., & Woever, O. (2003). *Regions and Powers : The Structures of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Czulda, R. (2019). *NATO Enhanced Forward Presence: Evolution, Meaning and the End Game*. Bratislava: SĽRAĽPOL.
- Gelzis, G. (2014, Maret 28). *Shoring up defenses in the Baltic*. Retrieved from Deutsche Welle: <https://www.dw.com/en/baltic-states-seek-nato-boots-on-the-ground/a-17528935>
- Georgievsk. (2015). *Prisoedinenie Kryma K Rossi V 2014 Godu Kak Eto Bylo?* Moskow: Ministerstvo Obrazovanija I Molodeznoj Politiki.
- Global Firepower. (2022). *Military Strength Comparisons for 2022*. Retrieved from Global Firepower: <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison.php>
- Hawser, A., & Zwilling, R. (2017, June 19). *All NATO Enhanced Forward Battle Groups in the Baltics Are Now in Place : The biggest build-up of forces for a generation on NATO's eastern flank is complete, but what is their effectiveness?* Retrieved from Defence Procurement International: <https://www.defenceprocurementinternational.com/features/air/natos-enhanced-forward-presence-in-the-baltics>
- Hooker, R. (2019). *How to Defend The Baltic States*. Washington: The Jamestown Foundation.
- Jakniunaite, D. (2016). Changes in Security Policy and Perceptions of the Baltic States 2014 – 2016. *Journal on Baltic Security*, 6-34.
- Jewkes, J., & Vukmanovic, O. (2017, Mei 11). *Suspected Russia-backed hackers target Baltic energy networks*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-baltics-cyber-insight-idUSKBN1871W5>
- Kampmark, B. (2021, April 27). *Cyber Warfare Between Estonia and Russia*. Retrieved from Official United States Air Force Website: <https://www.airuniversity.af.edu/Wild-Blue-Yonder/Articles/Article-Display/Article/2582363/russias-implementation-of-hybrid-warfare-estonia-07-georgia-08-crimea-14/>
- Kangsepp, L., & Rossi, J. (2014, September 5). *Estonia Says Officer Abducted Near Russian Border*. Retrieved from The Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/articles/estonian-officer-abducted-near-border-with-russia-1409928475>
- Latvian Public Broadcasting. (2022, Februari 23). *Baltic states demand OSCE meeting with Belarus over military drill concerns*. Retrieved from Eng.LSM.lv : <https://eng.lsm.lv/article/society/defense/baltic-states-demand-osce-meeting-with-belarus-over-military-drill-concerns.a443356/>
- McDermott, R. N., & Bartles, C. K. (2020). *Russia's Military Modernisation: An Assessment*. London: The International Institute for Strategic Studies.
- Ministry of Defence Republic of Latvia. (2019). *Regional cooperation*. Retrieved from Aizsardzības ministrija: <https://www.mod.gov.lv/en/nozares-politika/international-and-regional-cooperation/regional-cooperation>

- Ministry of Defence Republik of Latvia. (28). *Navy cooperation (BALTRON)*. Retrieved from Aizsardzības ministrija: <https://www.mod.gov.lv/en/nozares-politika/international-and-regional-cooperation/regional-cooperation/navy-cooperation>
- News, Russian Today. (2014, Maret 17). *Crimea declares independence, seeks UN recognition*. Retrieved from Russian Today News: <https://www.rt.com/news/crimea-referendum-results-official-250/>
- Nikers, O. T. (2022). Bureaucratic policy and defense cooperation among the Baltic states. *Security and Defence Quarterly*, 41-54.
- OSCE. (1995). *Speech at the NATO Crisis Management Seminar 1995*. Brussels: NATO Crisis Management Seminar 1995.
- Paganini, P. (2017, Mei 20). *Alleged Russian state-sponsored hackers behind Baltic energy networks*. Retrieved from Security Affairs: <https://securityaffairs.co/wordpress/59277/cyber-warfare-2/baltic-energy-networks-attack.html>
- Paulauskas, K. (2006, Februari). *The Baltics: from nation states to member states*. Retrieved from The European Union Institute for Security Studies (EUISS): <https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/occ62.pdf>
- Radin, A. (2017). *Hybrid Warfare in the Baltics: Threats and Potential Responses*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Ramadhani, S. (2019). Reaksi Ofensif Rusia Dalam Menghadapi NATO Pasca Konflik Krimea Tahun 2014-2017. *JOM FISIP*.
- Ramicone, d. (2014). *The Ukrainian Crisis : A Dispute Past and Present*. Cambridge: Harvard Policy Brief.
- Republic OF Estonia Defence Force. (2019). *BALNET*. Retrieved from Republic OF Estonia Defence Force: <https://mil.ee/en/defence-forces/international-co-operation/balnet/>
- Solonenko, I. (2015). *Ukrainian Civil Society from the Orange Revolution to Euromaidan: Striving for a New Social Contract*. Retrieved from IFSH: https://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/14/Solonenko-en_S.pdf
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tulak, A. N. (2016, Agustus 16). *New Challenges in the Information Environment*. Retrieved from Indo-Pacific Defense Forum: <https://ipdefenseforum.com/2016/08/hybrid-warfare/>
- Ulman, R. (1983). Redefining Security. *International Security*, 129-153.
- Van Tol, J., Bassler, C., Elgin, K. K., & Hacker, T. (2022). *DETERRENCE AND DEFENSE IN THE BALTIC REGION : NEW REALITIES*. Washington: The Center for Strategic and Budgetary Assessments. Retrieved from <https://news.err.ee/108612/details-of-baltic-battalion-emerge>
- VOA Indonesia. (2013, November 26). *Presiden Ukraina Bela Keputusan Tolak Kesepakatan Uni Eropa*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-ukraina-bela-keputusan-tolak-uni-eropa/1797647.html>
- VOV. (2013, Desember 18). *Rusia dan Ukraina menandatangani 14 permufakatan kerjasama*. Retrieved from VOV WORLD: <https://vovworld.vn/id-ID/berita/rusia-dan-ukraina-menandatangani-14-permufakatan-kerjasama-203096.vov>